

## FAKTOR–FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA LOMBONGO DI KABUPATEN BONE BOLANGO

Rusni Ente<sup>1</sup>, Ellys Rachman<sup>2</sup>, Lisda Van Gobel<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bina Taruna Gorontalo

[rusni.ente05@gmail.com](mailto:rusni.ente05@gmail.com)<sup>1</sup> [ellysrachman12@gmail.com](mailto:ellysrachman12@gmail.com)<sup>2</sup>, [Lisdavangobel69@gmail.com](mailto:Lisdavangobel69@gmail.com)<sup>3</sup>

Received: 05-08- 2025

Revised: 25-08-2025

Approved: 05-09-2025

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam implementasi kebijakan meliputi lemahnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta; keterbatasan anggaran yang hanya mencukupi kebutuhan operasional dasar; serta promosi yang belum efektif akibat minimnya pemanfaatan media digital dan belum terbentuknya branding destinasi yang kuat. Simpulan penelitian menyatakan bahwa pengembangan destinasi Lombongo memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif dan partisipatif, didukung alokasi anggaran memadai serta strategi promosi berkelanjutan agar potensi wisata dapat dioptimalkan.*

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Destinasi Wisata, Lombongo, Bone Bolango, Penghambat

### PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi daerah yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan lingkungan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022). Pengembangan sektor ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penguatan identitas lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Putra & Kencana, 2023). Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah menjadikan sektor pariwisata sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan (UNWTO, 2021).

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata adalah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, yang memiliki objek wisata alam Lombongo. Destinasi ini dikenal dengan daya tarik utama berupa sumber air panas alami, panorama alam pegunungan, serta kearifan lokal masyarakat sekitar yang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata edukatif dan rekreatif (Yusuf et al., 2024). Namun demikian, potensi besar tersebut belum mampu dioptimalkan secara maksimal. Berbagai faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan menjadi kendala utama dalam memajukan destinasi wisata Lombongo. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur dasar, minimnya promosi dan branding destinasi, belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, serta terbatasnya alokasi anggaran pembangunan pariwisata (Ismail & Rahman, 2023; Nasution, 2022). Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya daya saing destinasi dan tidak berjalannya kebijakan pengembangan secara efektif.

Implementasi kebijakan merupakan tahap kritis dalam siklus kebijakan publik, karena pada tahap ini rencana diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Menurut teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), keberhasilan implementasi dipengaruhi

oleh enam variabel utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi pelaksana (Wicaksono, 2021). Ketika variabel-variabel ini tidak terpenuhi secara ideal, maka kebijakan cenderung gagal di tingkat implementasi (Subarsono, 2022). Penelitian sebelumnya oleh Lestari (2021) menunjukkan bahwa pengembangan destinasi wisata berbasis alam seringkali menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan dan perencanaan. Selain itu, studi oleh Mulyani dan Firdaus (2020) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat lokal menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan pariwisata daerah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan kebijakan yang integratif dan partisipatif untuk mengatasi hambatan yang ada.

Dalam konteks destinasi wisata Lombongo, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Kegiatan promosi belum dilakukan secara konsisten, koordinasi antarpemangku kepentingan masih lemah, serta dukungan regulasi belum sepenuhnya memadai. Di sisi lain, potensi wisata Lombongo yang besar justru menjadi tidak termanfaatkan secara optimal (Rahmawati & Toding, 2024). Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis terhadap faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo, guna merumuskan strategi yang lebih efektif dan kontekstual bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

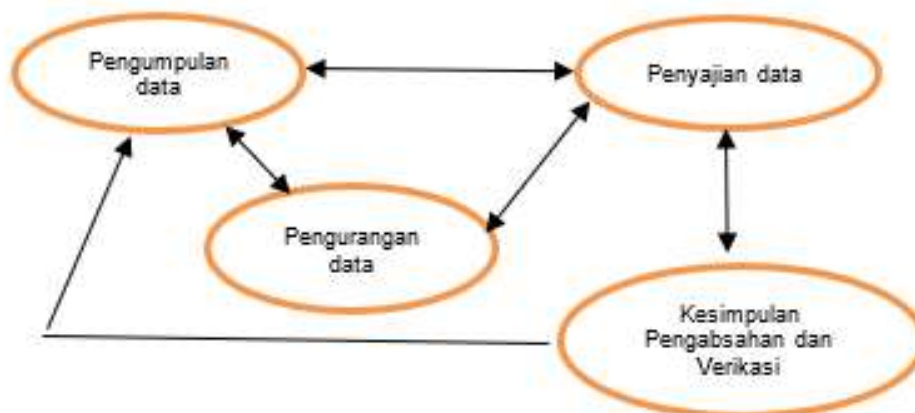
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual, mendalam, dan menyeluruh mengenai implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango. Menurut Sugiyono (2013), penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik melalui deskripsi yang mendalam terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Sementara itu, Sukardi (2019:15) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada upaya menggambarkan dan menjelaskan suatu objek penelitian apa adanya, tanpa perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (case study), di mana penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara intensif satu objek tertentu, yaitu pelaksanaan kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo. Pendekatan studi kasus dinilai tepat karena mampu memberikan gambaran kontekstual dan mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, desain ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis dan interpretasi secara menyeluruh terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terkait masalah yang dikaji.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, dengan pertimbangan bahwa instansi ini memiliki otoritas utama dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata daerah. Lokasi ini dipilih secara purposive karena keberadaannya yang strategis dan relevan dengan fokus penelitian. Adapun pelaksanaan penelitian direncanakan dalam jangka waktu tiga bulan, dimulai setelah surat izin penelitian diterbitkan pada tahun 2025. Situasi sosial dalam penelitian ini mencakup pengamatan terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata Lombongo. Peneliti akan melakukan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah daerah,

pelaku usaha pariwisata, maupun masyarakat sekitar destinasi. Melalui proses wawancara dan observasi di lapangan, peneliti akan menggali informasi mengenai dinamika yang terjadi serta mengidentifikasi kendala-kendala aktual dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan pariwisata.

Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, laporan kebijakan, arsip pemerintah, serta referensi ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi destinasi wisata Lombongo dan perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan kunci, dengan pendekatan wawancara tidak terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam penggalan data. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2020), wawancara merupakan proses interaktif antara dua pihak yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan ide secara mendalam. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh, berupa dokumen tertulis, foto, laporan resmi, dan bukti lain yang relevan dan valid. Melalui pendekatan dan metode yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran faktual mengenai berbagai faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo serta merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai, agar datanya jenuh (Miles and Huberman, 1984) dalam Sugiono, (2020). Adapun tahapan-tahapan analisis (*interactive model*) sebagai berikut:



**Gambar 1.** Model Interaktif pada Analisis Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Triangulasi

Teknik pengecekan Triangulasi dilakukan dengan cara triangulasi teknik,

sumber data dan waktu. Triangulasi dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan teknik berbeda, yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber berbeda, dalam hal ini sumber datanya bersumber dari pegawai sebagai pelaksana, dan pihak lain bersentuhan dengan fokus masalah. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara pengumpulan data pada waktu berbeda pada satu sumber, sehingga dapat mengetahui, dimana sumber data konsisten atau tidak konsisten dalam pemberian data.

2) Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah data pendukung dalam membuktikan data yang telah ditemukan pada penelitian, referensi berupa hasil penelitian sebelumnya, dokumen kebijakan atau sumber referensi lainnya seperti melalui situs internet.

Penulisan sesuai dengan etika penelitian, dimana etika penelitian terkait dengan cara dalam memilih subyek penelitian, perencanaannya, memperoleh akses data, mengumpulkan, menyimpannya, menganalisisnya dan melaporkan dengan etika. Sumantri, (2015) menyatakan bahwa etika penelitian terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Menghormati harkat dan martabat manusia

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek dalam memperoleh informasi terkait proses penelitian dan untuk memiliki kebebasan membuat pilihan mereka sendiri dan bebas dari tekanan mengambil bagian dari penelitian.

2) Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian.

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya, penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Meskipun tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu dimaksud.

3) Keadilan dan inklusivitas

Untuk memenuhi prinsip keterbukaan dan adil, penelitian harus dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, dan berperilaku kemanusiaan serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketepatan, kesaksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis dan perasaan religius subyek penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone Bolango, serta dokumentasi, ditemukan bahwa hambatan-hambatan utama dalam implementasi kebijakan mencakup: (1) lemahnya peran pemerintah, masyarakat, dan swasta, (2) keterbatasan anggaran, serta (3) rendahnya intensitas dan efektivitas promosi wisata. Temuan ini dianalisis menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan publik oleh Edward III, yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, dalam Subarsono, 2022). Di samping itu, teori Street-Level Bureaucracy oleh Lipsky (1980) dan prinsip-prinsip pengelolaan destinasi menurut UNWTO (2023)

juga digunakan sebagai landasan dalam memahami permasalahan di lapangan.

### **Peran Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta**

Ditemukan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah memiliki komitmen terhadap pengembangan sektor pariwisata, implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan komunikasi lintas sektor, minimnya koordinasi antar perangkat daerah, serta ketiadaan regulasi teknis dan insentif yang jelas untuk sektor swasta. Dalam praktiknya, birokrasi di tingkat pelaksana cenderung kaku dan lambat merespons kebutuhan lapangan, sesuai dengan teori Lipsky (1980) yang menyebutkan bahwa birokrasi level bawah cenderung mengalami tekanan dalam menjalankan kebijakan karena keterbatasan sumber daya dan beban kerja yang tinggi. Hal ini berdampak pada lambannya perbaikan infrastruktur wisata yang rusak akibat bencana (banjir bandang) serta minimnya inisiatif perbaikan dari pemerintah daerah. Dari sisi masyarakat, tingkat partisipasi warga lokal dalam kegiatan pengembangan destinasi masih rendah. Sebagian besar masyarakat hanya menjadi objek dari kebijakan, belum sepenuhnya dilibatkan sebagai subjek yang aktif. Di sisi lain, investasi sektor swasta belum signifikan, disebabkan oleh ketidakpastian hukum, kurangnya jaminan insentif ekonomi, dan belum adanya roadmap investasi pariwisata lokal yang jelas.

### **Keterbatasan Anggaran**

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala paling signifikan dalam pengembangan destinasi wisata Lombongo. Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, terungkap bahwa alokasi dana yang tersedia masih sangat minim dan hanya cukup untuk menunjang operasional dasar, seperti pemeliharaan rutin dan kegiatan administratif. Sementara itu, kebutuhan yang jauh lebih strategis seperti perbaikan infrastruktur, pembangunan fasilitas pendukung, pelatihan sumber daya manusia, hingga penyusunan strategi promosi jangka panjang belum dapat terpenuhi. Kondisi ini jelas menghambat proses revitalisasi destinasi secara berkelanjutan. Padahal, Lombongo memiliki potensi wisata yang besar dan berpeluang menjadi destinasi unggulan di Provinsi Gorontalo. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, potensi tersebut sulit untuk dimaksimalkan dan tidak mampu bersaing dengan destinasi lain yang telah lebih maju dalam hal promosi, infrastruktur, dan pelayanan wisata. Hal ini sejalan dengan pandangan Mubyarto (2022) yang menekankan bahwa lemahnya pembiayaan menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan sektor pariwisata di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu adanya langkah strategis untuk memperjuangkan peningkatan anggaran, baik melalui APBD, dana pusat, maupun kolaborasi dengan sektor swasta, agar pengembangan destinasi Lombongo dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

### **Promosi yang Kurang Efektif**

Promosi yang kurang efektif menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan destinasi wisata Lombongo. Meskipun potensi alam dan budaya di kawasan ini cukup besar, upaya promosi yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan sporadis yang tidak terencana secara sistematis. Tidak adanya rencana induk promosi pariwisata daerah (RIPPARDA) yang secara spesifik menjadikan Lombongo sebagai prioritas menunjukkan lemahnya perencanaan strategis dalam pemasaran destinasi. Padahal, menurut Kotler & Keller (2009), promosi merupakan elemen penting dalam

bauran pemasaran (marketing mix) yang bertujuan meningkatkan visibilitas dan daya tarik suatu produk atau jasa, dalam hal ini destinasi wisata. Sayangnya, Lombongo belum mengoptimalkan pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi utama, baik melalui platform media sosial, website resmi, maupun kampanye digital tematik. Konten visual yang digunakan pun masih kurang menarik dan belum mampu menciptakan citra destinasi yang kuat di benak calon wisatawan. Event-event lokal yang digelar pun belum diarahkan untuk menjangkau audiens yang lebih luas di luar daerah, sehingga dampaknya masih terbatas secara geografis. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat dalam upaya promosi masih rendah, terlihat dari minimnya partisipasi dalam menyebarkan informasi wisata melalui media sosial atau kegiatan komunitas sadar wisata. Kondisi ini mencerminkan lemahnya branding destinasi dan menunjukkan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, media, serta masyarakat lokal dalam membangun strategi promosi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

### **Analisis Temuan Berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn**

Jika dikaji lebih lanjut melalui kerangka teori implementasi Van Meter dan Van Horn (1975), maka enam variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tidak berjalan secara ideal pada konteks destinasi wisata Lombongo, yaitu:

- 1) Standar dan Tujuan Kebijakan: belum memiliki indikator keberhasilan yang terukur, terutama dalam aspek promosi dan peningkatan kunjungan.
- 2) Sumber Daya: sangat terbatas, baik dari aspek keuangan, SDM, maupun dukungan teknis.
- 3) Karakteristik Agen Pelaksana: birokrasi masih bersifat konvensional dan kurang responsif terhadap perubahan.
- 4) Komunikasi antar Organisasi: lemah, koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat belum optimal.
- 5) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik: belum mendukung, minimnya investasi dan partisipasi masyarakat.
- 6) Disposisi Pelaksana (Sikap dan Komitmen): meskipun ada semangat dari pihak dinas terkait, namun terbentur oleh berbagai hambatan struktural dan anggaran.

### **KESIMPULAN**

Bahwa implementasi kebijakan pengembangan destinasi wisata Lombongo di Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi berbagai hambatan yang signifikan, yang mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi wisata daerah tersebut. Tiga faktor utama yang menjadi penghambat adalah lemahnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta; keterbatasan anggaran yang hanya mampu menutupi kebutuhan operasional dasar tanpa menyentuh aspek strategis seperti infrastruktur dan pelatihan SDM; serta promosi yang belum efektif akibat minimnya pemanfaatan media digital dan belum terbentuknya branding destinasi yang kuat. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan, sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn, di mana enam variabel kunci seperti standar kebijakan, sumber daya, koordinasi, hingga disposisi pelaksana belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan destinasi Lombongo memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif, partisipatif, serta didukung oleh alokasi anggaran yang memadai dan strategi promosi yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Edward III, dalam Subarsono. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jkp.v10i2.2345>
- Ismail, A., & Rahman, B. (2023). Hambatan Pengembangan Pariwisata di Daerah Terpencil: Studi Kasus di Indonesia Timur. *Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*, 7(1), 33-48. <https://doi.org/10.5678/jpek.v7i1.9876>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Marketing Management* (13th ed.). Pearson Education.
- Lestari, D. (2021). Tantangan Kelembagaan dalam Pengembangan Destinasi Wisata Alam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pariwisata*, 8(3), 211-224. <https://doi.org/10.4321/jmp.v8i3.3456>
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. SAGE Publications.
- Mulyani, S., & Firdaus, T. (2020). Peran Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 101-115. <https://doi.org/10.21009/jsp.v6i2.2020>
- Mubyarto. (2022). Pembiayaan Pariwisata Daerah: Studi Kasus Keterbatasan Anggaran. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 12(1), 59-74. <https://doi.org/10.7890/jed.v12i1.4567>
- Nasution, F. (2022). Evaluasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata: Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Lokal. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan*, 9(1), 77-89. <https://doi.org/10.2222/jkp.v9i1.8765>
- Putra, H., & Kencana, I. (2023). Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 4(1), 12-25. <https://doi.org/10.3210/jpb.v4i1.1234>
- Rahmawati, E., & Toding, M. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Pariwisata Daerah di Sulawesi. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 11(2), 98-110. <https://doi.org/10.6789/jpi.v11i2.7654>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Subarsono. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 40-55. <https://doi.org/10.1357/jap.v14i1.2022>
- Sumantri, R. (2015). Etika Penelitian dalam Ilmu Sosial. *Jurnal Etika Penelitian*, 2(1), 15-25.
- UNWTO. (2021). *Global Report on Sustainable Tourism Development*. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/global-report-sustainable-tourism-2021>
- UNWTO. (2023). *Destination Management Principles and Practices*. World Tourism Organization. <https://www.unwto.org/destination-management-principles-2023>
- Wicaksono, D. (2021). Penerapan Teori Implementasi Van Meter dan Van Horn dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Studi Kebijakan*, 5(2), 67-81. <https://doi.org/10.2467/jsk.v5i2.2021>
- Yusuf, A., Sari, L., & Putri, N. (2024). Potensi Wisata Alam dan Budaya di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Pariwisata dan Budaya Lokal*, 9(1), 25-39. <https://doi.org/10.4321/jpbl.v9i1.1235>